



Prodi Ekonomi  
Syariah

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 5, No. 1  
Januari-Juni 2021  
Halaman: 1-7

# Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah Dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seri Murni, Qurratu Humaira

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Submit 4 April 2021  
Revisi 3 Mei 2021  
Diterima 2 Juni 2021

#### Kata Kunci:

The Role of Women,  
The Role of the Government,  
The Islamic Economic Perspective of  
UMKM

### ABSTRACT

*This study aims to determine whether the role of women and the government can develop UMKM in the city of Banda Aceh. This research uses qualitative and quantitative research (mixed methods), where quantitative research uses secondary data. The samples taken were women UMKM throughout the city of Banda Aceh, while the qualitative research used primary data. Data research analysis was carried out using descriptive statistical analysis methods by means of mapping with Arcgis 10.3 software and also using the help of Microsoft Excel. The results of this study indicate that the most significant role of women in this case is women who are in the adult category until old age. Meanwhile, for millennial women or young people the participation is still considered very low. The government plays an active role in building UMKM in the city of Banda Aceh which aims to raise the level of economic welfare of the community through UMKM. From an Islamic perspective, local government UMKM development programs based on sharia principles are very important, namely we can see in the Aceh Government Law (UU PA) that this year all UMKM must be based on sharia, and must also pass the Sharia Supervisory Board (DPS).*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran perempuan dan pemerintah dapat memperkembangkan UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif (metode campuran), dimana penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel yang diambil yaitu UMKM perempuan di seluruh Kota Banda Aceh sedangkan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Analisis penelitian data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif statistik dengan cara pemetaan dengan software arcgis 10.3 dan juga menggunakan bantuan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam hal ini yang paling signifikan adalah para perempuan yang berada pada katagori dewasa sampai pada usia lanjut. Sedangkan, bagi para perempuan milineal atau kaum muda partisipasinya dinilai masih sangat rendah. Pemerintah berperan aktif dalam membangun UMKM di kota Banda Aceh yang bertujuan mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Dari perspektif Islam, pemerintah daerah program pengembangan UMKM berdasarkan asas-asas syariah sangat penting yakni dapat kita lihat pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### Cara Mengutip:

Murni, Seri & Humaira, Qurratu. (2021). Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah Dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(1), 1-7.

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan

\* Corresponding author: Seri Murni

E-mail address: [seri.murni@ar-raniry.ac.id](mailto:seri.murni@ar-raniry.ac.id)

sosial dari negara, sehingga masyarakat masih berada di garis kemiskinan atau bahkan di bawah garis kemiskinan.

Pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, diperlukan perhatian aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. Rahman (2015) menyatakan bahwa untuk mengembangkan UMKM secara terus menerus terutama bagi UMKM yang bergerak di industri makanan, pemerintah harus membangun strategi pembangunan dalam bentuk kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM dengan semua pemangku kepentingan. UMKM merupakan unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja sektor informal. Kondisi ini dipandang sebagai salah satu indikasi perlunya pemberdayaan UMKM sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sumber utama pembangunan ekonomi di beberapa negara. Alasan UMKM lebih diperhatikan dibanding dengan Usaha Besar dikalangan internasional karena UMKM memberikan kontribusi yang berpengaruh bagi perekonomian. UMKM juga berkontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 93% di beberapa negara. UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin.

UMKM dapat mengembangkan inisiatif menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan tambahan hasil produksi yang padat karya. Di Indonesia, perkembangan UMKM hingga kini telah mencapai 52,8 juta yang tersebar diseluruh Indonesia pada tahun 2014. Dari segi lapangan usaha, pelaku UMKM masih mendominasi sektor pertanian, jasa dan perdagangan, 97,5% total usaha yang bergerak disektor pertanian, jasa dan perdagangan berasal dari UMKM, hanya 4,28% dari kelompok usaha besar. Kelompok usaha besar ini mendominasi usaha di sektor pertambangan sebesar 84,80%, sedangkan listrik, gas dan air bersih 92%. Keberadaan UMKM di Kota Banda Aceh telah memberikan arti yang sangat penting dalam menyediakan sumber mata pencaharian masyarakat. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh, khususnya pasca habisnya minyak dan gas dan lemahnya pertumbuhan industri-industri telah menjadikan UMKM sebagai penyedia alternatif lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh. Kendati pemerintah secara nyata telah memberikan dukungan terhadap UMKM di Kota Banda Aceh, namun kontribusi optimal UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh sangat bergantung pada produktivitas UMKM dan pengusaha itu sendiri. Produk – produk unggulan yang telah dimiliki oleh UMKM di kota Banda Aceh seperti olahan kopi, olahan ikan, produk kerajinan tangan dan lainnya.

Peran serta perempuan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, apabila kita telaah secara lebih seksama merupakan pemberdayaan masyarakat yang maknanya dapat disamakan dengan perolehan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Dapat kita lihat bahwa perempuan telah memberikan suatu andil terhadap masyarakatnya, disamping sebagai ibu rumah tangga, mereka juga mencoba peduli pada komunitas dimana mereka tinggal dan berdomisili. Perempuan saat ini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, namun juga bekerja pada sektor lain di luar rumah. Selama satu dekade terakhir, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup nyata, meskipun persentasenya kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sangat berarti dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, struktur angkatan kerja perempuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian, sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang canggih dan spesifik. Setiap tahun, jumlah perempuan yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal terus mengalami peningkatan. Banyak perempuan di Indonesia yang berhasil menduduki posisi penting di berbagai bidang, baik sebagai pengusaha, profesional seperti dokter, guru, tokoh politik dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, jumlah tersebut naik sebesar 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Sedangkan jumlah angkatan kerja Provinsi Aceh pada Februari 2019 sebanyak 2,459 ribu jiwa. Jumlah tersebut naik sebesar 105 ribu orang dibandingkan Februari 2018.

Dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

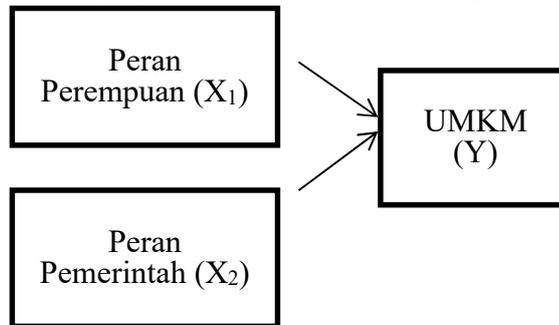
Berdasarkan penelitian terkait yang dilakukan oleh Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah Dan Muhajirah Hasanuddin (2017) tentang Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terkait yang dilakukan oleh Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah Dan Muhajirah Hasanuddin (2017). Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, lokasi penelitian dilakukan di Kota Enrekang, Sulawesi Selatan sebagai sampel penelitian. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Selain itu terdapat variabel lain yang akan diteliti yaitu peran perempuan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran perempuan dan pemerintah dalam perkembangan UMKM di kota Banda Aceh dengan judul yaitu “Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini ingin melihat Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



### Pengaruh Peran Perempuan Terhadap Perkembangan UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvina Fiskayola (2019) menunjukkan bahwa peran perempuan pedagang kaki lima di pasar Danau Binguang dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga adalah menambah dan meningkatkan kondisi perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih adapun bentuk meningkatkan pendapatan itu sendiri ialah dapat membantu suami, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan, papan, pangan dan sandang serta pendidikan dan kesehatan dapat dipenuhi dengan perempuan berdagang untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Tinjauan ekonomi syariah terhadap peran perempuan pedagang kaki lima di pasar Danau Binguang dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga secara umum sesuai dengan prinsip syariah yaitu dilakukan dengan usaha dan niat yang baik untuk membantu dan meningkatkan pendapatan keluarga.

### Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruben Angga Saputra, Wiwik Widayati dan Puji Astuti (2015) menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Departemen Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri sudah cukup baik di Indonesia melaksanakan pembangunan melalui program-program yang ada walaupun di beberapa sektor belum optimal.

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, dimana penelitian kuantitatif adalah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antarvariabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Kaitan atau hubungan yang dimaksud bisa berbentuk hubungan kausalitas atau fungsional. Yang mana tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mendapatkan penjelasan tentang besarnya kebermaknaan (*significance*) dalam model yang dihipotesiskan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan (Indrawan, 2014: 51). Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahan berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek data dari mana data diperoleh (Arikunto, 2014). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010). Data diperoleh dari wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh.
2. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat public, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku yang berkenaan dengan penelitian (Purhantara, 2010). Data dapat diperoleh dari perpustakaan, berupa buku-buku dan dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data. Kedua teknik pengumpulan data tersebut yaitu: wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara akan dilakukan kepada beberapa informan. Mereka meliputi Dinas Pemberdayaan UMKM Kota Banda Aceh.
2. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, *website*, dan lain-lain.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh UMKM di Kota Banda Aceh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun lapangan, dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian. Data penelitian yang telah diperoleh dapat dianalisis dengan metode analisis deskriptif, analisis deskriptif yaitu metode menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum sehingga dapat memperoleh gambaran informasi tentang penelitian tersebut (Sugiyono, 2014). Sedangkan analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara analisis statistik deskriptif dimana analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghozali (2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendiskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen yang diprosikan dengan dewan direksi dan ukuran perusahaan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif statistik dengan cara pemetaan dengan software arcgis 10.3 dan juga menggunakan bantuan Microsoft Excel.

---

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Kendala dalam Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM yang baik adalah yang dapat mengeliminasi risiko yang menjadi kendala bagi keberlangsungan perkembangan UMKM. Faktor modal menjadi permasalahan yang paing utama dalam upaya pengembangan UMKM. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM sedikit kesulitan mendapatkan modal segar untuk mengembangkan usahanya. Pengajuan yang sedikit rumit dalam mengambil pembiayaan menjadi salah satu penyebab masyarakat hanya bergantung pada modal pribadi yang dimilikinya. Selanjutnya, permasalahan pemasaran dan pendistribusian barang menjadi kendala karena mayoritas pelaku UMKM masih bersifat konvensional yakni memproduksi sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan permintaan mekanisme pasar. Kendala kurangnya promosi barang menjadi penyebab sulitnya pemasaran barang baik secara online dan offline. Selanjutnya, masih banyak juga para pelaku UMKM yang tidak memiliki *branding*. Di mana, *branding* merupakan salah satu kunci bagi promosi produk sehingga dapat diketahui oleh pelanggan. Branding yang menarik dan mudah diingat akan terus melekat pada para konsumen. Permasalahan branding tersebut yang kadang kali kurang menjadi perhatian bagi para pelaku usaha yang hanya menciptakan produk tanpa ada upaya menciptakan nilai dan kesan terhadap pelanggan/konsumen.

Kendala biaya yang minim juga terjadi pada pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pengembangan UMKM. Modal yang minim menyebabkan pemerintah daerah hanya memberikan fasilitas kepada para UMKM yang berada dalam naungan pemerintah daerah. Yang mana, pemerintah daerah juga terbatas dalam penyelenggaraan program diakibatkan anggaran yang terbatas. Hal ini menjadi penghambat kepercayaan bagi masyarakat kepada pemerintah daerah karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan modal kepada pihak UMKM. Untuk permasalahan yang sulit ini pihak dinas UMKM dalam perihal modal masih bergantung pada bantuan anggaran dana dari pemerintah daerah.

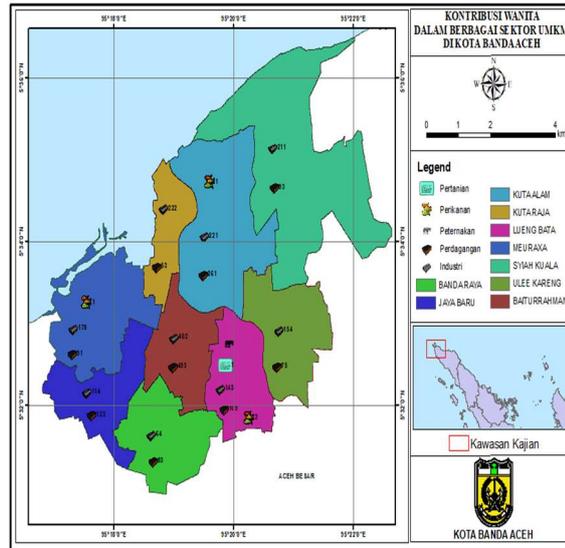
### Program Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM

Untuk mengimplementasikan tujuan dari program pengembangan UMKM di kota Banda Aceh pemerintah daerah melakukan langkah pelaksanaan program yakni melakukan kegiatan bazar. Kegiatan seperti bazar dinilai sangat efektif untuk mendorong kegiatan promosi pelaku UMKM di kota Banda Aceh. Dampaknya pun sangat signifikan karena dapat menarik antusias pelaku UMKM dan konsumen untuk ikut serta meramaikan bazar yang diselenggarakan. Melalui bazar para konsumen dapat bertatap muka langsung dengan para pelaku UMKM dan dapat merasakan aneka produk yang ada pada bazar. Langkah tersebut sangatlah baik untuk dilakukan secara terus menerus karena memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan UMKM di kota Banda Aceh.

**Peran Perempuan dalam Mengembangkan UMKM**

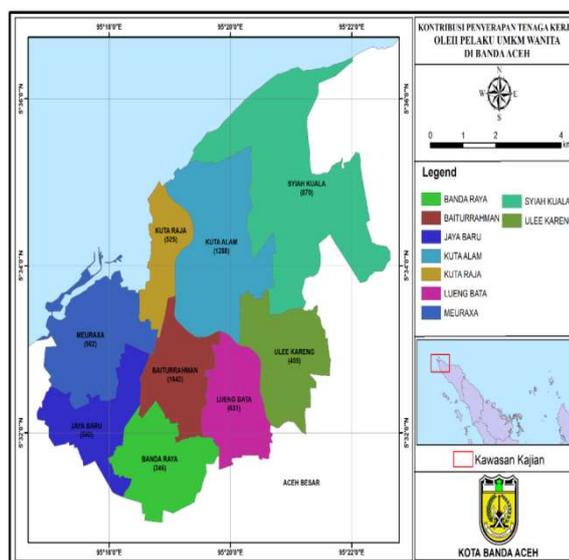
Program yang diselenggarakan tidak hanya menasar pada satu golongan saja, melainkan seluruh golongan. Diantaranya pada pelaku UMKM perempuan yang memiliki andil cukup besar bagi perkembangan UMKM di kota Banda Aceh. Peran perempuan dalam hal ini yang paling signifikan adalah para perempuan yang berada pada katagori dewasa sampai pada usia lanjut. Sedangkan, bagi para perempuan milineal atau kaum muda partisipasinya dinilai masih sangat rendah. Hal ini tidak lain dikarenakan para perempuan dewasa lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam membangun dan mengembangkan usahanya dibandingkan para perempuan muda yang masih sering coba-coba dan kurang konsisten dalam membangun sebuah produk. Meskipun tidak banyak pula para perempuan milineal yang mampu eksis dalam membangun produknya dari mulai kecil hingga besar.

**Peta Persebaran Pelaku UMKM Perempuan Berdasarkan 5 sektor**



Dari gambar di atas dapat dijabarkan bahwa dari 3096 pelaku UMKM perempuan dapat menyerap sebesar 6799 tenaga kerja dari total keseluruhan tenaga kerja yang bekerja pada 9591 UMKM di kota Banda Aceh yakni dalam persentasenya sebesar 27% pelaku UMKM perempuan menyerap tenaga kerja di kota Banda Aceh. Adapun penyerapan tenaga kerja pada UMKM perempuan berdasarkan masing-masing kecamatan pada gambar di atas adalah, pada kecamatan Baiturrahman sebesar 1642, Banda Raya 346, Jaya Baru 540, Kuta Alam 1288, Kuta Raja 525, Lueng Bata 631, Meuraxa 502, Syiah Kuala 870, dan Ulee Kareng 455. Di mana, dari 9 kecamatan tersebut kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam merupakan 2 kecamatan penyerap tenaga kerja terbesar dari pelaku UMKM perempuan di Banda Aceh.

**Peyerapan Tenaga Kerja oleh Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh**



Dari gambar di atas dapat dijabarkan bahwa dari 3096 pelaku UMKM perempuan dapat menyerap sebesar 6799 tenaga kerja dari total keseluruhan tenaga kerja yang bekerja pada 9591 UMKM di kota Banda Aceh yakni dalam persentasenya sebesar 27% pelaku UMKM perempuan menyerap tenaga kerja di kota Banda Aceh. Adapun penyerapan tenaga kerja pada UMKM perempuan berdasarkan masing-masing kecamatan pada gambar di atas adalah, pada kecamatan Baiturrahman sebesar 1642, Banda Raya 346, Jaya Baru 540, Kuta Alam 1288, Kuta Raja 525, Lueng Bata 631, Meuraxa 502, Syiah Kuala 870, dan Ulee Kareng 455. Di mana, dari 9 kecamatan tersebut kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam merupakan 2 kecamatan penyerap tenaga kerja terbesar dari pelaku UMKM perempuan di Banda Aceh.

Hanya saja dalam upaya memaksimalkan program pendampingan dan pengembangan UMKM perempuan pemerintah daerah menemui kendala bahwa:

“Untuk pelatihan sudah pernah kami laksanakan tetapi setiap kami melakukan kegiatan tersebut kemudian kami meminta saran untuk selanjutnya kegiatan seperti apa yang harus kami lakukan, tetapi para usahawan malah mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM).

Permasalahan ini memang sering terjadi tidak hanya pada pelaku UMKM perempuan. Banyak pelaku UMKM yang mengesamping pentingnya edukasi dan pelatihan pengembangan UMKM. Para pelaku UMKM tersebut hanya berfokus kepada modal dan fasilitas tanpa berniat untuk mendapatkan ilmu lebih untuk mengembangkan UMKM. Hal ini menjadi kelemahan keeratan hubungan antara program pemerintah daerah dengan pelaku UMKM karena tidak memiliki evaluasi diantara kedua belah pihak untuk keberlanjutan pengembangan UMKM. Sehingga diperlukan kesadaran dari pelaku UMKM bahwa tidak hanya modal dan fasilitas saja yang penting namun juga pelatihan dan edukasi untuk mengarahkan UMKM agar berkembang menjadi lebih baik.

Dari sisi perspektif Islam menurut pemerintah daerah program pengembangan UMKM berdasarkan asas-asas syariah sangat penting yakni:

“Kalau untuk perspektif Islamnya dapat kita lihat pada undang-undang UPA bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari dewan pengawas syariah.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Regulasi dari pemerintah daerah untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan UMKM menjadi nilai lebih dan pembeda bagi UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Hal ini menjadi ketentuan serta landasan bagi industri UMKM. Sehingga setiap pelaku UMKM dalam membangun usahanya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak mengalami kerugian dan tidak merugikan orang lain.

---

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Peran pemerintah yang dilakukan dalam pembangunan UMKM di Kota Banda Aceh adalah:

- 1) Melakukan seminar serta pelatihan
- 2) Memberikan bantuan berupa fasilitas
- 3) Promosi dan pemasaran

Peran pemerintah dalam berperan aktif dalam membangun UMKM di kota Banda Aceh yakni bertujuan mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Di mana, UMKM yang berkembang dengan baik dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di kota Banda Aceh karena terdapat sektor produktif pada UMKM. Pertumbuhan UMKM inilah yang menjadi daya untuk warga kota tumbuh menjadi pribadi yang bekerja dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta menjadi lebih produktif.

### 2. Peran perempuan dalam hal ini yang paling signifikan adalah para perempuan yang berada pada katagori dewasa sampai pada usia lanjut. Sedangkan, bagi para perempuan milineal atau kaum muda partisipasinya dinilai masih sangat rendah. Hal ini tidak lain dikarenakan para perempuan dewasa lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam membangun dan mengembangkan usahanya dibandingkan para perempuan muda yang masih sering coba-coba dan kurang konsisten dalam membangun sebuah produk. Meskipun tidak banyak pula para perempuan milineal yang mampu eksis dalam membangun produknya dari mulai kecil hingga besar.

### 3. Dari sisi perspektif Islam menurut pemerintah daerah program pengembangan UMKM berdasarkan asas-asas syariah sangat penting yakni dapat kita lihat pada undang-undang UPA bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari dewan pengawas syariah. Regulasi dari pemerintah daerah untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan UMKM menjadi nilai lebih dan pembeda bagi UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Hal ini menjadi ketentuan serta landasan bagi industri UMKM. Sehingga setiap pelaku UMKM dalam membangun usahanya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak mengalami kerugian dan tidak merugikan orang lain.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

---

- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik (2019), Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Tahun2019
- Departemen koperasi & UKM. (2008). *Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha*. ([www.Departemenkoperasi.go.id](http://www.Departemenkoperasi.go.id)).
- Departemen koperasi & UKM. (2008). *Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha*. ([www.Departemenkoperasi.go.id](http://www.Departemenkoperasi.go.id)).
- Devi Chandra Nirwana, (2017). Muhammadiyah, Muhajirah Hasanuddin, *Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Mmenengah di Kabupaten Enrekang*. Sulawesi Selatan.
- Fiskayola, Elvina. (2019) *Peran Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Pasar Danau Binkuang Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ketujuh*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indrawan, R., Yanawati R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2005). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Surabaya.
- Purhantara, Wahyu, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ruben Angga Saputra, Wiwik Widayati dan Puji Astuti. (2015). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM Ppengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Semarang*. Semarang,.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. XVI. Bandung: Alfabeta.